

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI JAWABARAT  
DALAM KERJASAMA INTERNASIONAL  
DI ERA OTONOMI DAERAH  
(Negara Bagian Australia Selatan, Australia)**

**SKRIPSI**



**Disusun oleh :**

**SUDARNA**

**20010510283**

**HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2006**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI JAWABARAT  
DALAM KERJASAMA INTERNASIONAL  
DI ERA OTONOMI DAERAH  
(Negara Bagian Australia Selatan, Australia)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai  
Gelar Sarjana Hubungan Internasional  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun Oleh :**

**SUDARNA  
20010510283**

**HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2006**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT  
DALAM KERJASAMA INTERNASIONAL  
DI ERA OTONOMI DAERAH  
(Negara Bagian Australia, Australia)



Nama : SUDARNA

NIM : 20010510283

Telah Diperiksa dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dan Dinyatakan Lulus Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 6 April 2006

Tim Penguji

Drs. Sudiyono, SU

( Ketua Penguji )

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djumadi'.

Drs. Djumadi M. Anwar, M.Si

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang'.

Dr. Bambang Cipto, MA

( Penguji Sampung II )

*Handwritten marks*

(HR. Ibnu Abid)

"Barangsiapa ingin tercabut doanya dan terhapus penderitaannya, hendaklah menolong orang-orang yang ditimpa kesukaran".

(QS. Al-Ashr : 1-3)

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh serta saling berpesan supaya mentaati kebenaran dan saling nasehat-menasihati supaya menjalankan kesabaran".

Motto

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI JAWABARAT DALAM KERJASAMA INTERNASIONAL DI ERA OTONOMI DAERAH (Negara Bagian Australia Selatan, Australia)" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tak lupa penulis juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para pihak yang turut membantu penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai. Atas dedikasi dan pengorbanannya penulis menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. H. Khoiruddin Bashori, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Dr. Sidik Jatmika, M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Drs. Sudiyono, SU, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ratih Herningtyas, S.IP, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Drs. Djumadi M.Anwar, M.Si, dan Dr. Bambang Cipto, MA, selaku tim penguji pada skripsi ini.
7. Sri Asmawati Kusumawardani, yang sudah memberikan data-data, bahan-bahan dan dukungannya selama penulis mengadakan penelitian dan seluruh Staf Bina Kerjasama Pemerintahan pada Biro Desentralisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah dan Bapeda Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

8. **Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis dalam mengurus administrasi selama menempuh kuliah sampai selesai.**

**Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Daerah-daerah lainnya dalam membina dan menjalin suatu kerjasama dengan luar negeri serta sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan walaupun jauh dari kesempurnaan.**

**Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Taufiq dan hidayah-Nya.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Pengajuan</b> .....	ii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	iii
<b>Motto</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>Bab I      Pendahuluan</b>	
A.   Alasan Pemilihan Judul .....	1
B.   Tujuan Penelitian .....	2
C.   Latar Belakang Masalah .....	2
D.   Perumusan Masalah .....	5
E.   Kerangka Dasar Teori .....	6
F.   Hipotesa .....	23
G.   Batasan Penulisan .....	23
H.   Metode Penelitian.....	24
I.   Sistematika Penulisan .....	26
<b>Bab II     Profil Pemerintah dan Wilayah Jawa Barat</b>	
A.   Profil Daerah .....	28
1.   Geografi .....	30
2.   Topografi .....	30
3.   Iklim .....	31
4.   Populasi .....	31
5.   Sosial Budaya .....	31
B.   Potensi Ekonomi dan Kondisi Umum .....	33
1.   Potensi Pertanian .....	34
2.   Potensi Perkebunan .....	36

3.	Potensi Peternakan .....	37
4.	Potensi Perikanan .....	38
5.	Potensi Kehutanan .....	39
6.	Potensi Industri .....	40
C.	Kondisi Politik dan Keamanan .....	42

**Bab III Kewenangan Daerah Untuk Mengadakan Kerjasama Internasional dengan Pihak Luar Negeri**

A.	Dasar dan Ruang Lingkup Pembahasan .....	45
A.1	Ruang Lingkup Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri .....	51
A.2	Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah....	54
A.3	Kewenangan Mengadakan Kerjasama Luar Negeri .....	55
B.	Maksud dan Tujuan Kerjasama Luar Negeri Daerah dengan Pihak Luar Negeri .....	61
C.	Pentahapan dan Prosedural Kerjasama .....	63
D.	Perjanjian Internasional Sebagai Aturan Administrasi Dalam Kerjasama Internasional .....	65
E.	Perjanjian Internasional Dalam Rangka Otonomi Daerah .....	68

**Bab IV Tata Cara dan Prosedur Penyelenggaraan Kerjasama**

A.	Peluang Daerah Untuk Mengadakan Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri .....	71
B.	Peraturan-peraturan yang Berlaku Mengenai Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri .....	84
C.	Kerjasama Antar Kota/Propinsi Bersaudara ( <i>Sister City / Propincc Cooperation</i> ) .....	98
1.	Pendahuluan .....	98
2.	Dasar Hukum .....	100



3.	Pedoman Umum .....	101
4.	Persyaratan Formal .....	103
D.	Tata Cara / Prosedur Pembentukan Kerjasama	
	Antar Kota / Propinsi / Negara Bagian .....	104
1.	Tahap Penjajagan .....	104
2.	Tahap Penyusunan Draf Persetujuan MoU....	105
3.	Tahap Penyelesaian / Penandatanganan MoU .....	106
4.	Tahap Pelaksanaan Kerjasama .....	107
5.	Tahap Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama .....	107

**Bab V Pelaksanaan Kerjasama Daerah Yang Dilakukan  
Oleh Jawa Barat Dengan Luar Negeri  
(Negara Bagian Australia Selatan, Australia)**

A.	Gambaran Umum Kerjasama.....	113
1.	Latar Belakang Kerjasama.....	113
2.	Landasan Hukum.....	115
3.	Maksud dan Tujuan Kerjasama.....	115
B.	Permasalahan.....	120
C.	Upaya Pemecahan Masalah dan Rencana Tindak Lanjut.....	121
1.	Upaya Pemecahan Masalah.....	121
2.	Rencana Tindak Lanjut.....	122

**Bab VI Kesimpulan dan Saran**

A.	Kesimpulan .....	124
B.	Saran .....	126

<b>Daftar Pustaka</b> .....	128
-----------------------------	-----

<b>Lampiran</b> .....	
-----------------------	--

- Kumpulan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah  
Propinsi DT I Jawa Barat dengan Pemerintah South Australia

Bandung- Agustus 1997, Bagian Koperasi Biro Bina Perekonomian  
Setwilda Tingkat I Jawa Barat;

- Kesepakatan Usaha Jawa Barat dan Perusahaan Negara Australia Selatan untuk Kerjasama Dalam Memperkembangkan Prasarana Air;
- Business Agreement between The West Java Promotion and Business Linkage Board and The South Australia Water Cooperation on Cooperation in Water Infrastructure Development;
- Contract Negotiations of South Australia Water Cooperation (Fax Cover Sheet);
- Surat Kuasa (*Full Powers*) tertanggal 15 Januari 2001, dengan Pemberi Kuasa Dr. Alwi Shihab, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Penerima Kuasa, R. Nuriana, Gubernur Jawa Barat, Republik Indonesia;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepala Daerah;
- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bandung tentang Pengelolaan Sumber Daya